

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini, masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan kreativitas. Sumber mengasah kemampuan, profesionalitas dan kreativitas ini salah satunya adalah melalui dunia pendidikan. Kualitas pendidikan harus dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, memicu semakin tingginya biaya pendidikan di Indonesia. Negara Indonesia memberikan dukungan kepada masyarakat untuk menuntut pendidikan agar masyarakat menjadi berkualitas, kreatif dan profesional. Salah satu bukti dukungan negara kepada masyarakat untuk menuntut ilmu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.

Sebagai implementasi dari UUD 1945 di atas yang menyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan warga negara, adalah adanya alokasi anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran pendidikan ini sebesar 20% dari APBN. Dengan adanya anggaran pendidikan untuk warga negara, diharapkan semua lini

masyarakat mampu mengenyam pendidikan tanpa adanya kendala faktor ekonomi.

Penelitian oleh Ajis, dkk (2013) tentang faktor-faktor anak putus sekolah pada tingkat SMA di Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, menyebutkan bahwa sebanyak 79% anak putus sekolah karena minimnya pendapatan orang tua. Sebanyak 84,2% karena orang tua memiliki jumlah anak yang banyak. Sebanyak 73,6% karena lingkungan sosial yang kurang baik, 63,2% karena rendahnya pendidikan orang tua, dan 68,4% karena rendahnya minat untuk bersekolah untuk membantu orang tua.

Mua, dkk (2017) lewat penelitiannya tentang faktor-faktor penyebab putus sekolah dari anak petani dan non-petani di Desa Sea dan Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab putus sekolah antara lain karena kemauan anak itu sendiri yang tidak menyukai sekolah. Faktor kedua karena kondisi keuangan ekonomi orang tua. Kemudian faktor ketiga yaitu karena lingkungan sosial, yaitu terpengaruh dengan anak putus sekolah lain.

Masyarakat yang kurang beruntung dan tidak bisa mengenyam pendidikan formal karena faktor-faktor tersebut, pemerintah mempunyai jalur pendidikan yang disebut Pendidikan Non Formal (PNF). Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas Pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan mengganti. Salah satu program kegiatan layanan PNF adalah pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel, kepatutan dan manfaat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai salah satu lembaga penyedia pendidikan kesetaraan, wajib menerapkan prinsip tersebut sebagai perwujudan *good corporate governance*. Hal ini sebagai salah satu pencegahan dan pengendalian terhadap kecurangan penggunaan Dana Alokasi Khusus oleh lembaga pendidikan.

Masalah yang sering terjadi adalah karena dana pendidikan merupakan sumber paling beresiko terjadinya penyelewengan dana. Dana pendidikan seharusnya digunakan secara efektif untuk dialokasikan pada kebutuhan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Pentingnya unsur akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pada lembaga pendidikan adalah untuk mengetahui dan meminimalkan terjadinya kecurangan dana pendidikan yang ada. Akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab memberikan informasi tentang aliran dana dalam pembiayaan. Transparansi memberikan dampak kepercayaan karena keterbukaan proses penyelenggaraan dan kemudahan informasi yang didapat. Apabila akuntabilitas dan transparansi berjalan dengan baik, maka efektivitas dalam pengelolaan suatu dana pun akan tercipta dengan baik pula.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Rakhmawati (2018) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS dan transparansi berpengaruh negatif terhadap efektivitas dana BOS. Dana BOS adalah Dana Alokasi Khusus di bidang pendidikan untuk lembaga pendidikan formal. Untuk pendidikan kesetaraan Dana Alokasi yang diberikan berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan. Mengingat banyaknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang menyediakan pendidikan kesetaraan dan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan DAK Nonfisik, serta agar masyarakat mengetahui bahwa lembaga pendidikan nonformal juga telah mengimplementasikan *good corporate governance*, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bantul”

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan

(BOP) Pendidikan Kesetaraan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bantul?

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bantul?

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang timbul, maka diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari berbagai kesalahan persepsi yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang diteliti adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan.
2. Penelitian dilakukan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bantul.
3. Penelitian dilakukan tahun 2019.
4. Penelitian ini memakai akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel x, sedangkan untuk variabel y yang digunakan adalah efektivitas pengelolaan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengetahui adanya pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui adanya pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bantul.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Lembaga Pendidikan Non Formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di dalam peningkatan

efektivitas pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada lembaga pendidikan non formal.

F. Kerangka Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi dalam lima bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab yang akan dirinci sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka penulisan skripsi yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini membahas landasan teori dan pengembangan hipotesis yang melandasi penelitian menilai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP) Pendidikan Kesetaraan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bantul, meliputi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK), pendidikan kesetaraan, akuntabilitas dan transparansi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, instrument penelitian yang digunakan dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan deskripsi gambaran umum penelitian, menguraikan deskripsi objek penelitian dan membahas instrument penelitian. Selanjutnya akan menguraikan pengujian persyaratan pengolahan data serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini membahas kesimpulan hasil penelitian, implikasi/saran dan mengungkapkan keterbatasan dari penelitian yang mungkin dapat diantisipasi oleh peneliti selanjutnya dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.